BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan kebutuhan umum setiap orang. Bagi sejumlah orang, transportasi umum merupakan hal pokok untuk melakukan segala aktivitas mereka. Ada berbagai macam transportasi umum yang terdapat di masyarakat. Mulai dari dalam kota, dalam provinsi, hingga keluar pulau atau bahkan ke luar negeri. Transportasi ini membutuhkan perhatian yang tidak sedikit karena banyak orang yang tergantung akan sarana ini.

Salah satu transportasi yang sering digunakan dan populer di kalangan masyarakat dalam kota adalah Bus. Transportasi ini murah dan sering ditemukan, baik di kota maupun di desa. Seiring dengan ramainya kota, maka sarana transportasi yang dibutuhkan juga meningkat. Kebutuhan akan sarana ini berkembang untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk juga meningkat.

Semarang, salah satu ibu kota di Indonesia juga memperhatikan segi transportasi bagi warganya. Ini terlihat dari direncanakannya kehadiran bus yang setara dengan Busway di Jakarta dan Trans Jogja di Yogyakarta. Sedikit tertinggal dengan dua kota tersebut, Semarang baru merencanakan pengoperasiannya pada tahun 2009. Menurut pemberitaan Suara Merdeka 14 September 2009, sebanyak 20 unit bus diluncurkan sebagai percobaan awal sarana ini.

Kemunculan Bus Rapid Trans (BRT) di Semarang sesungguhnya bukan barang baru. Pembangunan halte bus tersebut telah dilakukan bertahun-tahun yang

lalu. Namun tidak ada realisasi untuk mengoperasikan halte tersebut. Oleh karena itu, halte tersebut akhirnya rusak karena lama tidak digunakan. Berbagai persiapan dilakukan, diantaranya dibentuk tim konsorsium BRT hingga penataan ulang bus yang sedang beroperasi pada trayek BRT mendatang, seperti diberitakan Suara Merdeka tanggal 12 Januari 2009.

Pada tahun 2009, setelah beberapa lama sejak pembangunan halte-halte tersebut, pemerintah dan PT Trans Semarang mulai menghidupkan halte tersebut dengan mengoperasikan bus yang kemudian diberi nama Bus Rapid Transit (BRT). Bus ini dimaksudkan melanjutkan kesuksesan Busway di Jakarta dan Trans Jogja di Yogyakarta. Kota Semarang dianggap sebagai pasar yang mampu untuk diberikan sarana transportasi yang baru karena penggunaan transportasi umum di kota ini masih tergolong tinggi.

Setelah sempat tertunda sejak peluncuran BRT pertama pada 2 Mei 2009 yang gagal dan akhirnya peluncuran kedua pada 14 September 2009, bus ini ternyata mengalami banyak kendala. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Pengoperasian BRT tidak mendapatkan respon positif pada awal peluncurannya. Masyarakat merasa bahwa BRT kurang efisien karena pemberhentiannya jauh dari rumah mereka. Selain itu, perang tarif antara bus umum lainnya terjadi seiring dengan kemunculan BRT ini. Semakin hari pengoperasian bus ini, makin banyak kegagalan dan kerugian yang diderita.

Meski banyak warga Semarang yang antusias akan kehadiran sarana transportasi baru ini, namun kenyataannya, tidak banyak penumpang yang memilih angkutan ini. Banyak cara telah diluncurkan oleh pengelola, namun antusiasme

masyarakat tetap tidak berubah sehingga semakin hari BRT semakin merugi. Masyarakat hanya mencoba-coba sarana baru ini, namun pada akhirnya tetap memilih menggunakan transportasi yang biasa mereka gunakan sebelumnya. Kehadiran BRT hanya sekedar untuk percobaan belaka.

Surat Kabar Harian (SKH) Suara Merdeka sebagai koran lokal Semarang, tentu tidak ketinggalan memberitakan masalah ini. Karena masalah ini merupakan masalah transportasi penting yang terjadi di kota Semarang, maka sudah selayaknya SKH Suara Merdeka sebagai salah satu koran lokal yang memberikan halaman khusus Semarang memberitakan masalah ini. BRT merupakan permasalahan yang selalu mendapatkan tempat di surat kabar ini.

Surat kabar sebagai salah satu bentuk pers memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi informasi (Sumadiria, 2005:32). Sehingga, berita-berita yang ada dalam koran diharapkan dapat memberikan informasi secepatnya kepada para pembaca, dan sebagai pengawas atas tindakan pemerintah, dengan menyampaikan kebijakan, tindakan pemerintah dengan tujuan kesejahteraan masyarakatnya.

Selama bulan-bulan awal masa percobaan BRT, SKH Suara Merdeka mengikuti perkembangan masalah ini. SKH Suara Merdeka terdiri dari dua bendel. Pertama untuk masalah umum dan bendel kedua berisi berita-berita kawasan Jawa Tengah dan hampir setiap berita BRT ini muncul di bagian halaman depan rubrik Semarang Metro. Rubrik Semarang Metro memang hanya menyoroti masalah di seputar daerah Semarang dan kota-kota di sekitarnya. Sedangkan untuk berita nasional, terdapat di bendel utama koran ini.

Masa-masa peluncuran BRT bertepatan dengan masa lebaran, sehingga koran memberikan lebih banyak ruang bagi berita-berita transportasi. Terlebih ketika peluncuran BRT bermasalah, hal tersebut lalu marak diberitakan oleh SKH Suara Merdeka. Sebagai koran lokal Jawa Tengah, Suara Merdeka berfungsi sebagai saranan informasi atas berita-berita yang berada di kawasan Jawa Tengah dan sekitarnya. Karena BRT merupakan proyek yang ada di kota Semarang, maka media-media yang berada dekat dengan kejadian tersebut sering memberitakan, baik elektronik, maupun cetak, tidak terkecuali SKH Suara Merdeka. Namun Suara Merdeka sendiri cukup memberikan porsi dalam setiap liputan yang terkait dengan masalah ini.

Analisis penelitian yang peneliti gunakan adalah analisis isi pemberitaan BRT yang merupakan pelayanan transportasi publik sebagai produk dari kebijakan publik. Peneliti melihat ada beberapa faktor karakterisitik berita dan bagaimana media memberitakan pelayanan publik tersebut. Karena arah perdebatan mengenai isu-isu sosial serta munculnya juru bicara mengenai isu-isu tersebut sebagian besar bisa bergantung pada pilihan media akan sumber berita (Strentz, 1993:126).

Contoh penelitian analisis isi lainnya adalah Analisis Isi Berita Pembangunan Perikanan dan Kelautan pada SKH Kaltim Pos yang dibuat oleh Eko Sugiharto pada tahun 2007. Penelitian yang dibuat oleh dosen Universitas Mulawarman ini bertujuan menjelaskan karakteristik profil berita, yang berhubungan dengan proporsi frekuensi dan volume berita, berdasarkan jenis atau topik utama tulisan berita tersebut. Penelitian ini menghasilkan kecenderungan pemberitaan pada SKH Kaltim Pos ternyata tidak didominasi oleh berita pembangunan perikanan dan

kelautan. Berdasarkan bidang cetak media, berita pembangunan perikanan dan kelautan hanya menempati sebagian kecil pemberitaan koran tersebut.

Selain itu, penelitian berhubungan dengan analisis isi yang meneliti isi berita juga peneliti temukan pada penelitian Agnes L.S. Fobia, mahasiswa komunikasi Atma Jaya tahun 2000. Penelitian yang berjudul pemberitaan Muktamar NU Dalam Surat Kabar Indonesia ini menggunakan metode analisis isi tentang posisi pers pada peliputan berita Muktamar NU 1999 pada surat kabar Kompas, Republika dan Jawa Pos. Penelitian ini meneliti perbandingan kecenderungan isi pemberitaan koran-koran tersebut menyikapi suatu peristiwa.

Penelitian tersebut menunjukkan posisi surat kabar yang diperhatikan dari frekuensi pemberitaan yang ada, menunjukkan tidak ada perbedaan antara Kompas, Republika dan Jawa Pos. Perbedaan yang nampak hanya pada sumber berita. Posisi pers dalam memberitakan Muktamar NU 1999 memiliki posisi yang sama, yaitu sebagai alat ukur pendapat umum. Ketiga surat kabar tersebut lebih banyak menginformasikan Muktamar NU dari sudut pandang informasi yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan penelitian analisis isi sebelumnya, peneliti kemudian ingin mengetahui bagaimanakah kebijakan publik pada SKH Suara Merdeka, terkait dengan kasus BRT di kota Semarang.

B. Perumusan Masalah

Bagaimanakah kebijakan publik dalam pemberitaan Bus Rapid Transit (BRT) pada halaman Semarang Metro di SKH Suara Merdeka?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui kebijakan publik dalam pemberitaan Bus Rapid Transit (BRT) pada halaman Semarang Metro dan bagaimana kasus tersebut dikemas oleh SKH Suara Merdeka dalam penerbitannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Sebagai sumbangan bagi pendidikan jurnalistik terkait berita kebijakan publik dalam pemberitaan di SKH Suara Merdeka

2. Manfaat Praktis

Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya menggunakan tema atau metode yang sama, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti berikutnya.

E. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Robert Eyestone adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (Winarno, 2002:15).

Sedangkan menurut Carl Friedrich, kebijakan dipandang sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-

kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Winarso, 2001:16). Para ahli kemudian mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (Winarso, 2001:17).

Ciri-ciri kebijakan menurut Anderson adalah (Abidin, 2006:41):

a. Setiap kebijakan mesti ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Bila tidak ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan.
b. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbatai kebijakan dalam masyarakat dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah.
d. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
e. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarkat mematuhinya.

Unsur-unsur kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif: proses kebijakan dan struktur kebijakan. Dari sisi proses kebijakan, terbagi atas tahap-tahap pengidentifikasian masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Tahap pengidentifikasian masalah dan tujuan berarti suatu kebijakan dibutuhkan karena ada tujuan yang hendak dicapai. Jika tidak ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Tujuan merupakan prasyarat untuk pengadaan kebijakan (Abidin, 2006:103). Masalah dapat dianggap sebagai penyebab timbulnya gangguan atau hambatan terhadap kelangsungan suatu kondisi yang normal.

Tahap kedua adalah formulasi kebijakan. Masalah yang masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada (Winarno, 2002:29). Formulasi

kebijakan mencakup agenda kebijakan dan perumusan kebijakan publik. Agenda kebijakan adalah sebuah daftar permasalahan atau isu yang mendapat perhatian serius karena berbagai sebab untuk ditindaklanjuti atau diproses pihak berwenang menjadi kebijakan (Abidin, 2006:127). Jadi, agenda kebijakan didefinisikan sebagai sebuah tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu (Winarso, 2002:58).

Pada perumusan kebijakan berbagai alternatif strategi diperhitungkan dengan menggunakan kriteria yang berdasarkan atas nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Abidin, 2006:143).

Tahap ketiga adalah pelaksanaan kebijakan yang mengaitkan berbagai lapisan dan kelompok dalam masyarakat. Pelaksanaan kebijakan adalah upaya pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat yang tidak terlepas dari berbagai konflik politik di masyarakat (Abidin, 2006:191). Ada dua konsep dasar pelaksanaan kebijakan, pertama peralatan kebijakan yang merupakan cara yang dipakai dalam menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau ingin dicapai. Kedua adalah kewenangan yang merupakan kekuasaan tertentu yang dipunyai dan secara formal diakui pihak-pihak lain untuk menggunakan peralatan yang tersedia dalam melaksanakan kebijakan (Abidin, 2006:196-198).

Tahap terakhir adalah evaluasi yang merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahap dalam proses kebijakan. Evaluasi awal melakukan penilaian atas konsep rencana dengan tujuan menyempurnakan konsep, *monitoring* melakukan evaluasi atas pelaksanaan,dengan tujuan untuk melakukan koreksi guna menyempurnakan pelaksanaan, sementara

evaluasi kinerja melakukan penilaian secara menyeluruh untuk waktu yang akan datang.

Dari segi struktur, terdapat lima unsur (Abidin, 2006:44-53). Pertama, tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan. Tujuan kebijakan yang baik setidak-tidaknya memenuhi empat kriteria yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, jelas, dan berorientasi ke depan. Tujuan yang diinginkan berarti dapat diterima banyak pihak karena kandungan isinya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut banyak pihak. Mewakili kepentingan mayoritas atau didukung golongan yang kuat dalam masyarakat. Sedangkan tujuan yang rasional merupakan pilihan terbaik dari beberapa alternatif atas dasar kriteria-kriteria yang relevan dan masuk akal. Selain itu, realistis yaitu pemakaian materialnya harus sesuai dengan jatah yang ditentukan untuk hal tersebut (Abidin, 2006:45). Selain itu, tujuan ini masuk akal (logis) dan mempunyai gambaran yang jelas. Pola pikirnya runut dan mudah dipahami langkah-langkah mencapainya.

Tujuan kebijakan yang mempunyai orientasi ke depan ini mengandung beberapa pengertian (Abidin, 2006:46) yaitu (a) tujuan kebijakan yang dimaksud menimbulkan kemajuan ke arah yang diinginkan, atau berdasarkan angka-angka atau kriteria-kriteria tertentu terlihat peningkatan; (b) tujuan yang ingin dicapai di masa depan itu terletak dalam suatu jangka waktu tertentu, sehingga setelah suatu masa tertentu dapat dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan kebijakan tersebut; (c) orientasi ke depan berarti tujuan yang berada di depan dalam jangka waktu tertentu itu dicapai secara terus menerus tanpa henti.

Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan publik. Penentuan masalah yang salah dapat berakibat besar pada kegagalan proses kebijakan. Jika suatu masalah telah diidentifikasikan dengan tepat, berarti sebagian pekerjaan dapat dianggap sudah dikuasai.

Unsur ketiga adalah tuntutan, muncul karena salah satu dari dua penyebab (Abidin, 2006:48): (a) diabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka; (b) karena munculnya kebutuhan baru setelah suatu tujuan dicapai atau suatu masalah terpecahkan.

Unsur keempat adalah dampak, yang merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Misalnya, ketika seseorang melempar sebuah batu ke kolam yang airnya tenang, pengaruh jatuhnya batu akan menimbulkan riak dalam air yang makin meluas di sekitar tempat jatuhnya batu (Abidin, 2006:50). Pengaruh tersebut disebut *multiplier effects* atau pengaruh-ganda. Yang terjadi dalam bidang sosial dan politik, setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat daripada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.

Unsur terakhir yaitu sarana atau alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa contoh sarana antara lain: kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri.

Peralatan kebijakan ini sangat bervariasi dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan (Abidin, 2006:241). Campur tangan

pemerintah dianggap wajar, yakni dalam penanganan apa yang dikenal dengan istilah *public goods*, yakni barang atau jasa yang tidak dapat diatur melalui pasar, baik dalam produk dan distribusi maupun dalam penentuan harga (Abidin, 2006:245).

Kebijakan perlu dibedakan dari keputusan yang biasa berdasarkan sisi-sisi yang ada. Ini diperlukan karena setiap kebijakan mempunyai konsekuensi dan menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mengandung unsur-unsur yang baik pula (Abidin, 2006:59).

2. Media Massa dan Pelayanan Publik

Media massa adalah sarana untuk menyalurkan pesan jurnalistik kepada khalayak banyak. Menurut arti katanya, media artinya alat komunikasi, sedangkan massa adalah kependekan dari kata masyarakat (orang banyak), jadi media massa adalah alat komunikasi yang boleh dimanfaatkan untuk semua orang (Djuroto, 2000:10). Dengan kata lain, media massa adalah alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi yang mencakup segala aspek dan proses penyampaian pesan (Assegaff 1991:10).

Pelayanan publik adalah semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, diatur, dan diawasi oleh pemerintah karena pemenuhannya diperlukan untuk perwujudan dan perkembangan kesaling tergantungan sosial dan pada hakikatnya, perwujudan sulit terlaksana tanpa campur tangan pemerintah (Haryatmoko, 2007:73). Maka, pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Sinambela, 2007:5).

Dengan demikian, pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Pemerintah daerah memiliki wewenang yang sangat luas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan rakyat daerah (Sinambela, 2007:26).

Perubahan sistem reformasi Indonesia mendorong pemerintah menciptakan kebijakan dan pelayanan publik yang semakin baik dan memihak kepada kepentingan luas masyarakat. Untuk itu, pemihakan pemerintah kepada kepentingan publik melalui pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih menguntungkan (Sinambela, 2007:33). Pemerintah tidak harus melakukan semua pelayanan publik, tetapi memberi peran kepada perusahaan swasta (Sinambela, 2007:13).

Secara umum, pelayanan publik memiliki tiga ciri, yaitu (Haryatmoko, 2007:74):

a. Ada perbedaan kualitatif antara kegiatan yang diakui sebagai pelayanan publik dan kekuatan yang diakui sebagai pelayanan publik dan kegiatan yang datang dari inisiatif dan tujuan pribadi atau swasta;
b. Perbedaan pelayanan publik ini berarti lebih penting dibanding dengan kegiatan lain sejenis, maka diatur secara khusus;
c. Pelayanan publik memiliki legitimasi publik yang melekat pada kekuasaan negara.

Pelayanan publik kemudian dapat dimengerti sebagai pengambil alihan tanggung jawab oleh kolektivitas atas sejumlah kekayaan, kegiatan atau pelayanan yang harus lepas dari logika kepemilikan pribadi atau swasta dan harus dihindarkan dari tujuan mencari keuntungan (Haryatmoko, 2007:74). Prinsip-prinsip pelayanan publik menurut B. Libois ada tiga, yaitu (Haryatmoko, 2007:74):

a. Kontinuitas, dipahami sebagai tidak boleh berhenti sama sekali meskipun ada pemogokan. Jadi pelayanan tetap dijalankan (setidaknya pelayanan minimum) meski harus berhadapan dengan hak pekerja untuk mogok atau kepentingan keuangan perusahaan.
b. Kesetaraan, berarti tiadanya diskriminasi dalam hal isi atau yang mengisi hanya atas dasar identitas dan universalitas dalam mendefinisikan yang masuk kategori publik dan zona geografis.

c. Adaptif berarti selalu mengikuti perkembangan kebutuhan sosial, bahkan mungkin harus meninggalkan kegiatan tertentu bila dapat dijamin dan secara sosial bisa ditermima oleh pelaku lain. Prinsip ini menjaga keseimbangan pelayanan publik antara kolektivisme dan liberalisme ekonomi (tuntutan pasar) agar bisa mencapai tujuan kolektif.

Pelayanan publik tidak harus selalu diawasi negara. Media diharapkan menyediakan saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, yang membatu menjelaskan tujuan, merumuskan kebijakan, dan mengkoordinasi aktivitas (Haryatmoko, 2007: 77).

Fungsi pers lainnya menurut Sumadiria (2006:32) adalah informasi, edukasi, koreksi, rekreasi dan mediasi. Fungsi informasi adalah menyampaikan informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat yang seluas-luasnya. Sedangkan melalui fungsi edukasi, pers diharapkan melaporkan berita, memberi tinjauan atau analisis atas berbagai peristiwa dan kecenderungan yang terjadi,serta ikut berperan dalam mewariskan nilai-nilai luhur universal, nilai-nilai dasar nasional, dan kandungan budaya lokal dari satu generasi ke generasi lainnya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi koreksi yang dimaksudkan agar pers mengawasi atau mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif agar kekuasaan mereka tidak menjadi korup dan absolut. Fungsi menghibur yaitu pers harus mampu menetapkan dirinya sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan sekaligus yang menyehatkan bagi semua lapisan masyarakat. Fungsi yang terakhir adalah fungsi mediasi (penghubung) yang berarti pers menghubungkan tempat yang satu dengan tempat yang lain, peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya, orang yang satu dengan orang lainnya pada saat yang bersamaan.

3. Berita

Berita bukanlah cermin kondisi sosial, tetapi sebuah laporan tentang salah satu aspek yang telah ditonjolkannya sendiri (McQuail 1995:190). Berita dalam arti teknis jurnalistik adalah laporan tentang fakta atau ide yang termasa, yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca, entah karena ia luar biasa, entah karena pentingnya atau akibatnya, entah pula karena ia mencakup segi-segi *human interest* seperti humor, emosi dan ketegangan (Assegaff 1991:24). Selain itu berita juga diartikan sebagai hasil rekonstruksi tertulis dari realitas sosial yang terdapat dalam kehidupan (Abrar, 2005: 2).

Nilai-nilai penting dalam berita diurutkan dari yang terpenting adalah (Margantoro, 2001: 31) :

a. Penting, menyangkut kehidupan orang banyak atau mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca.
b. Besar, menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak.
c. Waktu, menyangkut hal-hal yang baru terjadi atau diketemukan.
d. Dekat, kejadian yang dekat dengan pembaca, geografis, emosional.
e. Tenar, menyangkut hal-hal yang terkenal atau sangat dikenal pembaca.
f. Manusiawi, kejadian yang memberikan sentuhan perasaan kepada pembaca.
g. Eksklusif, menyangkut sesuatu yang istimewa.

Dalam pemberitaan terdapat dua jenis informasi yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan berita, yaitu fakta dan opini. Fakta adalah semua keterangan yang diungkapkan oleh nara sumber dan semua hasil observasi wartawan. Menurut Alastair Reid, fakta hanya sebagian dari realitas. Realitas hanya akan diperoleh dari

penggabungan berbagai fakta yang terdapat dalam *setting* tertentu dan berlaku dalam konteks tertentu pula. Sedangkan opini adalah penilaian moral seseorang terhadap suatu peristiwa dan fenomena (Abrar, 2005:20).

Berita surat kabar umumnya ditulis dengan cara penuturan yang lebih lugas dan langsung. Berita surat kabar umumnya lebih banyak memuat berita langsung (*straight/hard/spot news*), yaitu berita yang dilaporkan berdasarkan pengamatan langsung di tempat kejadian. Selain itu, ada format berita lain, seperti berita kisah (*feature*) atau laporan mendalam (*indepth report*) yang disajikan dengan cara penuturan yang tidak terlalu lugas dan tidak terlalu langsung (Siregar, 2002:33). Bentuk-bentuk berita yang muncul dalam surat kabar atau majalah berita, dapat digolongkan menjadi (Siregar, 2002:154-159):

a. Berita langsung

Berita langsung digunakan untuk menyampaikan kejadian yang penting yang secepatnya perlu diketahui oleh pembaca. Unsur-unsur terpenting dalam persitiwa itu harus langsung disampaikan kepada pembaca. Aktualitas adalah faktor penting untuk berita langsung. Berita dianggap aktual karena baru saja diketahui, meskipun usianya lebih dari satu hari.

b. Berita ringan

Berita ringan tidak mengutamakan unsur penting yang ingin diberitakan, namun unsur menariknya. Berita ini ditemukan sebagai kejadian yang manusiawi dalam kejadian penting. Kejadian yang penting tersebut ditulis sebagai berita langsung, sedangkan yang menyangkut unsur manusiawi ditulis sebagai berita ringan.

c. Berita kisah

Berita kisah adalah berita mengenai kejadian yang dapat menyentuh perasaan, ataupun yang menambah pengetahuan pembaca lewat penjelasan terperinci, lengkap, serta mendalam. Berita ini tidak terikat aktualitas. Nilai uamanya adalah unsur manusiawi atau informasi yang dapat menambah pengetahuan. Berita kisah tidak hanya menguraikan unsur manusiawi yang menyentuh perasaan, namun juga kisah yang menguraikan profil suatu perusahaan atau organisasi ini dalam mencapai tujuannya.

d. Laporan mendalam

Laporan mendalam digunakan untuk menuliskan permasalahan secara lebih lengkap, mendalam, dan analitis. Penulisan ini dimaksudkan untuk menyajikan informasi agar pembaca lebih memahami duduk permasalahan suatu masalah.

> Dengan laporan mendalam, ke arah mana perkembangan suatu persitiwa akan lebih mudah dipaparkan, juga kaitan yang lebih jelas antara sebab akibat, apa saja kepentingan sejumlah pihak di dalam perkembangan persoalan tersebut, bagaimana kepentingan itu mempengaruhi arah perkembangan persoalan, termasuk apa dampak yang mungkin timbul, menjadi sorotan dalam laporan mendalam. (Siregar, 2002:158)

Laporan ditulis berdasarkan hasil liputan terencana dan sering memiliki waktu yang lama. Cara peliputan yang digunakan interpretatif dan investigasi. Interptetatif digunakan untuk menggambarkan duduk perkara dari masalah yang diliput, sedangkan investigasi digunakan apabila ada usaha sejumlah pihak untuk menutupi kejadian sebenarnya, atau menutupi sejumlah fakta (Siregar, 2002:159).

Berita jurnalistik biasanya adalah berita yang paling banyak menarik perhatian masyarakat. Berita ini biasa disebut *hard news*. Berita ini berkenaan dengan kegiatan pemerintahan, politik, ekonomi, hubungan internasional, pendidikan, agama, badan perwakilan, pengadilan, badan pemerintahan dan swasta

(Mappatoto, 1993:97). Dalam masyarakat *modern*, alinea yang digunakan dalam pemberitaan cenderung pendek (Mappatoto, 1993:108). Alinea pendek ini terutama digunakan untuk berita jurnalistik. Dua prinsip panjang pendek alinea adalah: alinea harus cukup panjang agar terurai gagasan sentral sepenuhnya dan sejelas-jelasnya. Sebaliknya, jangan terlalu pendek agar tidak dinilai dangkal oleh pembacanya (Mappatoto, 1993:108). Menurut Abrar, panjang berita dapat dilihat dari jumlah paragraf berita, yaitu sangat panjang untuk 21 paragraf lebih, panjang untuk 16-20 paragraf, sedang untuk 11-15 paragraf, dan pendek untuk 6-10 paragraf.

Penempatan berita juga memperhatikan tingkat kepentingan sebuah berita. Berita dengan cerita yang dianggap paling penting diperhatikan pertama dan berita lainnya ditempatkan setelah penentuan berita utama, hingga halaman-halaman terpenuhi (Baskette, 1977:283). Pemilihan berita untuk halaman pertama dan halaman-halaman penting lainnya dapat ditangani dengan beberapa cara. Setiap halaman menunjukkan daftar berita yang penting, dan sebagai sebuah kelompok, diputuskan berita apa yang akan diletakkan pada halaman pertama dan di mana berita-berita akan ditempatkan dalam halaman-halaman berikutnya (Harriss, 1985:518).

Para pembaca cenderung memulai sebuah halaman dengan membaca melalui sisi sebelah kiri ke kanan. Kemudian membalik halaman berikutnya melalui sisi sebelah kanan dan memulai membaca dari kiri ke kanan, demikian selanjutnya hingga halaman selesai. Oleh karena itu, headline dan berita-berita lainnya diatur sehingga para pembaca dapat mengikuti alur yang diberikan (Baskette, 1977:282).

Pada halaman pertama, berita yang ingin ditonjolkan diletakkan sebagai *headline* untuk menarik perhatian pembaca dan menunjukkan kesimpulan dari berita yang dibawa oleh suatu koran (Baskette, 1977:57). Hal ini menunjukkan perhatian editor koran terhadap permasalahan para pembaca karena halaman pertama sebaiknya menunjukkan hal-hal yang lebih menarik dari halaman-halaman lain dengan meletakkan berita yang paling penting untuk menarik para pembaca (Baskette, 1977:339).

Halaman dalam umumnya berisi berita yang berdampingan dengan iklan. Pada halaman dalam, pengaturan letak iklan dilakukan pertama setelah itu baru letak beritanya (Baskette, 1977:342).

4. Sumber Berita

Untuk dapat mengetahui dan merekonstruksi realitas sosial agar menjadi sebuah berita, perlu digunakan metode pengumpulan fakta ataupun opini yaitu dengan cara observasi dan wawancara (Abrar, 2005: 23). Observasi merupakan pengamatan terhadap realitas sosial. Pengamatan terhadap realitas ini terdiri atas pengamatan langsung dan juga pengamatan tidak langsung. Dikatakan pengamatan langsung bila sebuah peristiwa disaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri. Dikatakan tidak langsung bila suatu peristiwa tidak langsung disaksikan, melainkan mendapat keterangan dari orang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut. Sedangkan wawancara adalah sebuah tanya jawab antara seorang wartawan dengan nara sumber untuk mendapatkan data tentang sebuah fenomena (Abrar, 2002:24).

Informasi pemberitaan tersebut didapatkan dari sumber berita yang diperoleh oleh wartawan. Berdasarkan sifatnya, Sumadiria (2005:97) membagi sumber berita ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah sumber berita formal atau resmi, yaitu sumber berita yang dikenal umum terutama oleh pers, yaitu pusat kegiatan pemerintahan, seperti kantor sekretariat negara, kantor gubernur, bupati atau wali kota, kantor polisi kejaksaan, ruang sidang DPR dan para pejabat penting itu sendiri. Sedangkan kelompok kedua yaitu sumber berita informal atau tidak resmi, yaitu sumber berita yang diperoleh dari anggota masyarakat atau tokoh masyarakat, para ilmuan, para teknisi, dan para peneliti lapangan. Sumber berita tidak resmi bisa pula menyangkut berita kejadian yang berlangsung tidak terduga, seperti kecelakaan, perampokan dan bencana alam.

Jurnalis (reporter,koresponden) akan menggali kontak dengan orang yang berpengaruh karena lebih untuk diikut sertakan dalam kejadian yang bernilai berita dan karena opini serta tindakan mereka lebih menarik individu lain, yakni penerima berita. Pemilihan fokus pada orang-orang elit ditujukan untuk kejadian politik yang dibuat nampak terutama dalam tindakan orang yang berpengaruh (Kunczik, 1995:159).

Untuk memastikan aliran informasi, ada sebuah kecenderungan mendasar dari jurnalis untuk mengadopsi posisi penilaian dari sumber-sumber mereka berdasarkan perolehan informasi yang mereka dapatkan. Reporter memerlukan berita konstan dan keinginan untuk publikasi serta liputan yang positif, yaitu, membiarkan pembuatan berita yang menunjukkan para pegawai pemerintahan yang ditunjuk sebagai sumber informasi. Menurut Tunstall (Kunczik, 1995:159), kontak dengan

orang-orang penting dan keterkenalan mereka untuk kejadian penting yang terjadi akan menjadi salah satu daya tarik terbesar jurnalisme. Informasi tingkat tinggi dibuat oleh jurnalis juga sering membuat mereka diterima sebagai pemberi pesan (Kuncizk, 1995:159).

Sumber berita dapat diseleksi menurut seberapa cocok mereka dengan pembentukan berita untuk mewakili sebuah isu, perhatian, atau peristiwa (Strentz,1993:52). Menurut Lazarsfeld dan Merton, arah perdebatan publik mengenai isu-isu sosial serta munculnya juru bicara dan para pemimpin mengenai isu-isu tersebut sebagian besar bisa bergantung pada pilihan media akan sumber berita (Strentz, 1993:126).

Beberapa sumber berita secara rutin dipercaya karena posisi atau keahlian mereka. Pejabat pemerintah memiliki status sebagai sumber berita karena tanggung jawab mereka kepada publik. Reporter memilih sumber tersebut karena sumber-sumber ini ternyata tepat, berwenang, dan dapat dipercaya (Strentz, 1993:129).

Dalam beberapa kasus, semakin seringnya menggunakan sumber tertentu mungkin mengindikasikan pendefinisian isu secara satu sisi atau akan dapat diprediksikan mengacu pada peliputan satu arah. Untuk kejadian dengan pengaruh yang besar, tanggapan pertama mungkin membentuk tanggapan publik, dan definisi kejadian tersebut, serta sumber-sumber ‘ahli’ dan sumber-sumber resmi mungkin memainkan peran yang dapat diperkirakan (McQuail, 1995:229).

F. Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka teori tersebut, kemudian didapat kerangka konsep sebagai berikut:

UNIT ANALISIS	KATEGORISASI	SUB KATEGORISASI
1. Letak berita	a. Halaman pertama *headline* b. Halaman pertama *non-headline* c. Halaman dalam	
2. Panjang berita	a. Sangat panjang b. Panjang c. Sedang d. Pendek	
3. Sumber berita	a. Gubernur b. Walikota c. Dewan pemerintahan dan konsorsium terkait d. Masyarakat e. Tokoh masyarakat f. Peneliti lapangan	
4. Unsur-unsur kebijakan publik	a. Pengidentifikasian masalah dan tujuan kebijakan b. Formulasi kebijakan	• Latar belakang dan tujuan kemunculan BRT • Agenda rapat untuk persiapan BRT • Pengaturan dana untuk pengadaan BRT • Perencanaan

	c. Pelaksanaan kebijakan	peluncuran BRT di masyarakat • Penetapan tarif BRT • Penambahan dan perbaikan sarana serta shelter bis • Kelengkapan surat dari armada BRT • Kesiapan supir, misalnya SIM hingga kesiapan supir dalam menjalankan BRT • Kesiapan penjaga shelter BRT, misalnya dalam mengurusi *ticketing* dan mengatur penumpang di shelter yang akan naik ke BRT
	d. Dampak kebijakan	• Tanggapan masyarakat akan kemunculan BRT sebagai sarana transportasi baru di Semarang • Persaingan yang terjadi di kalangan sesama usaha jasa angkutan umum di Semarang setelah kemunculan BRT
	e. Evaluasi kebijakan	• Penilaian dari

		masyarakat dan pemerintah, berupa penilaian kegagalan atau kesuksesan BRT setelah berjalan di masyarakat • Kritik terhadap kemunculan BRT sebagai transportasi baru di Semarang • Saran untuk perbaikan pelaksanaan BRT di masa mendatang

G. Definisi Operasional

Berdasarkan unit analisis pada penelitian isi pemberitaan kasus BRT di SKH Suara Merdeka, maka unit analisis tersebut dapat digunakan untuk menjadi landasan kategori operasional penelitian selanjutnya.

1. Letak Berita

a. Halaman pertama *headline*: berita yang masuk dalam kategori ini adalah berita yang terletak di halaman A dalam halaman Semarang Metro dan merupakan *headline*, yaitu berita yang ditonjolkan.

b. Halaman pertama *non headline*: berita yang masuk dalam kategori ini adalah berita yang terletak di halaman A dalam halaman Semarang Metro namun bukan sebagai *headline*.

c. Halaman dalam: berita yang masuk dalam kategori ini adalah berita yang terletak di halaman B hingga halaman F

2. Panjang Berita

a. Sangat panjang: berita yang termasuk dalam kategori ini adalah berita yang panjangnya lebih dari 21 paragraf.
b. Panjang: berita yang termasuk dalam kategori ini adalah berita yang panjangnya 16-20 paragraf.
c. Sedang: berita yang termasuk dalam kategori ini adalah berita yang panjangnya 11-15 paragraf.
d. Pendek: berita yang termasuk dalam kategori ini adalah berita yang panjangnya 6-10 paragraf.

3. Sumber Berita

a. Gubernur; apabila berita mengarah pada pendapat atau pernyataan yang didapatkan dari Gubernur Jawa Tengah yang mendukung pemberitaan BRT.
b. Wali Kota; apabila berita didasarkan pada pendapat atau pernyataan Wali Kota yang mendukung pemberitaan BRT.
c. Dewan pemerintahan dan konsorsium terkait; apabila berita didasarkan pada pendapat atau pernyataan yang mengarah pada anggota dewan yang berwenang terhadap kasus BRT. Dewan yang berwenang bisa berupa para nara sumber yang berasal dari bagian transportasi, Dinas Perhubungan, maupun pihak lain, misalnya pihak konsorsium yang berhubungan dengan peluncuran BRT.

d. Masyarakat; apabila berita didasarkan pada pendapat atau pernyataan masyarakat. Masyarakat di sini adalah kaum umum selaku pengguna BRT.

e. Tokoh Masyarakat; apabila berita didasarkan atau mengarah pada pendapat atau pernyataan dari tokoh masyarakat. Misalnya, tokoh agama, tokoh LSM maupun orang-orang yang memiliki jabatan di masyarakat di luar dewan pemerintahan terkait yang turut memberikan perhatian akan BRT.

f. Peneliti lapangan; apabila berita didasarkan atau mengarah pada pendapat atau pernyataan peneliti lapangan. Peneliti lapangan mencakup ilmuan dan para ahli yang berkompeten akan peristiwa tersebut, yaitu bisa berupa dosen, pakar transportasi, pengamat transportasi dan orang-orang lain yang pendapatnya diperhitungkan dalam permasalahan tersebut.

4. Unsur-Unsur Kebijakan Pemerintah:

a. Pengidentifikasian masalah dan tujuan kebijakan: berita yang masuk dalam kategori ini adalah berita BRT yang menunjukkan latar belakang mengapa pemerintah membuat BRT serta tujuan dari diadakannya BRT. Selain itu, berita didominasi oleh asal muasal dan tujuan kebijakan untuk menyelesaiakan permasalahan yang ada yang kemudian memunculkan BRT sebagai penyelesaian.

b. Formulasi kebijakan: berita yang masuk dalam kategori ini adalah berita yang menampilkan agenda dan perumusan kebijakan tersebut. Agenda ini bisa termasuk tuntutan untuk melakukan suatu tindakan. Pada berita BRT, formulasi yang nampak bisa berupa agenda rapat untuk persiapan BRT, dapat berupa rapat konsorsium; pengaturan dana yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan BRT

tersebut; perencanaan peluncuran BRT di masyarakat; serta penetapan tarif BRT. Formulasi kebijakan mencakup berita pra operasional BRT di Semarang.

c. Pelaksanaan kebijakan: berita yang termasuk dalam kategori ini adalah berita yang mengandung unsur-unsur pengoperasionalan BRT di lapangan. Berita ini juga mengandung peralatan kebijakan yang merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan, atau berita tersebut mengandung unsur kewenangan untuk menggunakan peralatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tujuan kebijakan. Misalnya, berita yang secara dominan mengandung berita mengenai pengoperasionalan BRT; pembuatan maupun penambahan sarana serta shelter bis; kelengkapan surat-surat, misalnya surat jalan bis, STNK bis, juga armada bis; hingga kesiapan para pelaksana di lapangan seperti supir, misalnya SIM supir hingga kesiapan supir dalam menjalankan bis; dan kesiapan penjaga shelter BRT, misalnya dalam mengurusi *ticketing* dan mengatur penumpang di shelter yang akan naik ke BRT.
d. Dampak kebijakan: berita yang termasuk dalam kategori ini didominasi oleh pemberitaan yang mengandung pengaruh dari kemunculan BRT sebagai unit pelayanan transportasi publik yang baru. Misalnya, berupa tanggapan masyarakat akan kemunculan BRT sebagai sarana transportasi baru di Semarang, hingga persaingan yang terjadi di kalangan sesama usaha jasa angkutan umum di Semarang setelah kemunculan BRT.
e. Evaluasi kebijakan: berita yang termasuk dalam kategori ini adalah berita yang isinya didominasi oleh pemberitaan mengenai evaluasi atas pelaksanaan. Evaluasi dapat berupa kritik maupun saran yang berisi penilaian untuk kemajuan

BRT di masa yang akan datang. Misalnya, evaluasi mengenai keberhasilan atau kegagalan BRT setelah beroperasi, kritik kepada pemerintah maupun kepada penyelenggara, hingga saran untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Tehnik Penelitian

Penelitian yang mengambil topik Pemberitaan BRT pada SKH Suara Merdeka ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode analisis isi. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Penelitian ini lebih mementingkan keluasan data sehingga data atau hasil penelitian dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi (Kriyantono, 2006:57). Penelitian ini bersifat objektif dan menggunakan uji statistik untuk menganalisis data (Kriyantono, 2006:58). Analisis isi adalah sebuah tehnik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematik dan objektif karakteristik-karakteristik khusus dalam sebuah teks (Krippendorff, 1993:19). Sedangkan menurut Berelson dan Kerlinger, analisis isi adalah metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang nampak (Kriyantono, 2007:228).

Analisis isi digunakan untuk menganalisis pesan dan bagaimana pesan tersebut disampaikan, maka analisis isi hanya dapat menjawab apa ciri pesan yang tertulis dan bagaimana pesan tersebut disampaikan. Prinsip sistematis berarti ada perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang dianalisis. Periset tidak hanya

menganalisis yang sesuai dengan minat dan perhatiannya saja, tetapi pada keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diriset. Prinsip objektif berarti hasil analisis tergantung pada prosedur riset. Kategori yang sama bila digunakan untuk isi dan prosedur yang sama, maka hasilnya juga harus sama, meski menggunakan riset yang berbeda. Sedangkan prinsip kuantitatif berarti bahwa penelitian ini mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan berbagai jenis yang didefinisikan . Analisis pada penelitian ini juga meneliti isi yang nampak, bukan makna yang dirasakan oleh peneliti (Kriyantono, 2007:228).

Pada penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis prinsip pelayanan publik sebagai hasil kebijakan publik yang nampak dalam pemberitaan BRT pada halaman Semarang Metro di SKH Suara Merdeka menggunakan metode penelitian isi. Selanjutnya isi pesan tersebut diolah secara sistematis dengan menggunakan lembar koding secara objektif untuk menunjukkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang merupakan tujuan penelitian ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian untuk analisis isi berita pemberitaan kasus BRT adalah SKH Suara Merdeka. Pemilihan koran ini disebabkan karena masalah BRT adalah masalah yang terjadi di kota Semarang. Koran Suara Merdeka adalah koran Jawa Tengah yang berpusat di kota Semarang. Sebagai koran lokal, SKH Suara Merdeka dibangun untuk dan oleh orang-orang lokal. Fungsi dari koran lokal adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, apakah itu kebutuhan dari segi pendidikan, segi informasi atau hiburan (Mulyana, 2008:108). Selain Suara Merdeka,

beberapa koran lokal lain yang beredar di Semarang adalah Radar Semarang dan Meteor (masuk dalam Jawa Pos Grup), serta koran sore Wawasan yang dimiliki oleh Suara Merdeka Grup.

Kedekatan lokasi peristiwa tersebut dengan koran SKH Suara Merdeka yang adalah koran lokal membuat pemberitaan ini memiliki nilai berita. Kedekatan merupakan salah satu nilai dalam sebuah pemberitaan. Kedekatan dapat berupa kejadian yang dekat dengan pembaca, geografis, maupun emosional (Margantoro, 2001:31). Selain itu, Suara Merdeka merupakan koran lokal yang memiliki oplah besar di Semarang. Sampai saat ini, Suara Merdeka mampu menjual 350-400 ribu eksemplar setiap harinya. Karena oplah besar itulah, Suara Merdeka dapat dengan mudah diperoleh di Semarang. Sedangkan untuk Radar Semarang yang juga beredar di Semarang sejak 1 April 2000 memiliki tiras 55.700 eksemplar.

Umumnya, semakin mudah diperoleh, semakin besar sikap membantunya, dan semakin dapat diterima secara sosial dan kultural penggunaan sebuah media, semakin mungkin media dipertimbangkan untuk digunakan sebagai alternatif fungsi yang tepat. Alternatif itu dapat berupa memuaskan kebutuhan individu, dan ketergantungan mereka atas media tersebut (Winarso, 2005:118). Atas dasar itulah penulis memutuskan untuk mengambil koran lokal Suara Merdeka sebagai objek penelitian skripsi ini.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau fenomena yang diteliti (Kriyantono, 2007:149). Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan mencakup 61 berita

mengenai kasus seputar BRT terbitan bulan Desember 2008 hingga Desember 2009. Alasan pemilihan waktu tersebut karena:

- Bulan Desember dimulainya penataan ulang konsep pengoperasian BRT oleh pemerintah kota Semarang.
- Pengoperasian BRT dilakukan pada bulan September 2009. Maka, peneliti ingin membatasi penelitian ini hingga 3 bulan masa uji coba BRT di Semarang ini, yaitu hingga bulan Desember 2009.
- 13 bulan jangka penelitian disebabkan peneliti ingin melihat pemberitan seputar kasus BRT sebelum dioperasionalkan hingga selama 3 bulan masa percobaan berjalannya transportasi baru di kota Semarang ini dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan.

Sedangkan sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek atau fenomena yang akan diteliti (Kriyantono, 2007:149). Sampel yang peneliti pilih adalah seluruh berita yang terdapat pada populasi.

Bulan	Jumlah Berita	Persentase
Desember 2008	3	4,92 %
Januari 2009	2	3,28 %
Februari 2009	6	9,84 %
Maret 2009	-	0 %
April 2009	3	4,92 %
Mei 2009	11	18,03 %
Juni 2009	10	16,39 %

Juli 2009	5	8,19 %
Agustus 2009	3	4,92 %
September 2009	11	18,03 %
Oktober 2009	5	8,19 %
November 2009	-	0 %
Desember 2009	2	3,28 %
Total	**61**	**100 %**

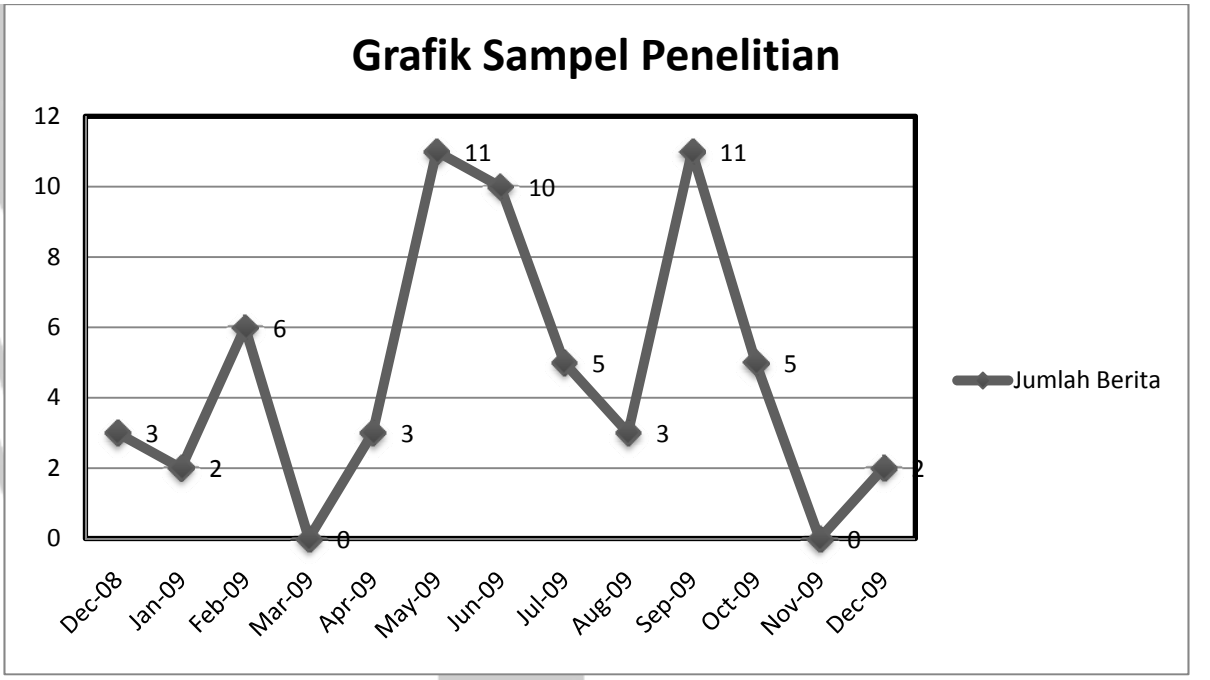

4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi tidak langsung (*indirect observation)* di mana peneliti akan meneliti produk komunikasi, dalam hal ini teks berita (Frey, 1991 : 114). Penelitian dilakukan dengan

pendokumentasian berita yang sesuai dengan penelitian. Berita-berita ini dikumpulkan dan diseleksi langsung oleh peneliti, yaitu berita pada SKH Suara Merdeka yang memiliki relevansi dengan pemberitaan kasus BRT di kota Semarang. Pendokumentasian ini tergolong dalam data primer. Selain itu, penelitian juga menggunakan sejumlah informasi yang berasal dari luar data primer tersebut. Informasi ini diperoleh melalui studi pustaka dari sejumlah literatur, jurnal, skripsi, teori atau wacana terkait serta penelitian yang menggunakan metode sejenis. Informasi ini kemudian disebut data sekunder.

Data hasil penelitian yang diperoleh selanjutnya diolah secara kuantitatif demgan memperhatikan dan mencatat frekuensi kemunculan unit analisis yang sebelumnya telah ditetapkan dan disampaikan dalam lembar *coding sheet*. Selanjutnya data tersebut akan dikelompokkan dalam bentuk tabel agar memudahkan pengangalisaan data tersebut.

5. Pengkodingan

Pengkoding yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak kedua yang turut membantu penelitian ini. Pengkoding dipilih oleh peneliti atas dasar kesamaan minat dan kemampuan terhadap topik penelitian ini. Pengkoding akan meneliti berita seputar kasus BRT di SKH Suara Merdeka periode Desember 2008 hingga Desember 2009.

6. Uji Reliabilias

Uji reliabilitas dalam penelitian ini diperlukan untuk menjaga reliabilitas kategorisasi, yaitu pengumpulan data. Supaya objektif, maka kategorisasi harus dijaga reliabilitasnya. Terutama untuk kategorisasi yang dibuat sendiri oleh periset sehingga belum memiliki standar yang teruji (Kriyantono, 2007: 234). Hasil pengkodingan penelitian, dimasukkan dalam rumus Holsty. Rumus Holsty digunakan untuk melihat apakah data yang digunakan dalam analisis ini dapat memenuhi harapan melalui pengolahan data nominal dalam bentuk presentase pada tingkat persamaan. Rumusnya adalah:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan:

CR : Koefisien Reliabilitas

M : Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkoding dan peneliti

N1, N2 : Jumlah pertanyaan yang diberi kode oleh pengkoding dan peneliti

Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari rumus tersebut disebut persetujuan yang diperoleh dari penelitian (*Observed Agreement*). Kemudian untuk memperkuat hasil uji reliabilitas itu, digunakan rumus Scott sebagai berikut:

$$pi = \frac{\%\ Persetujuan\ dari\ penelitian - \%\ Persetujuan\ yang\ diharapkan}{1 - \%\ Perse浜ujuan\ yang\ diharapkan}$$

Keterangan:

Pi : nilai keterandalan penelitian

7. Analisis Data

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakterisitik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat (Rakhmat, 1991:22). Setelah data dikelompokkan dalam tabel untuk memudahkan analisis, maka penelitian akan dijabarkan secara deskriptif untuk membahas berita BRT pada halaman Semarang Metro di SKH Suara Merdeka tersebut.

Hasil pengkodingan yang telah dilakukan oleh pengkoding dan interkoder kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Melalui hasil analisis data inilah akan diketahui kebijakan publik dalam berita BRT pada halaman Semarang Metro di SKH Suara Merdeka.